

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Konsep Pariwisata

Pada umumnya, pandangan masyarakat mengenai kepariwisataan berkaitan dengan orang-orang yang sedang mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk keperluan hiburan dan rekreasi. Padahal, pariwisata tidak hanya berkaitan dengan hal tersebut. Namun, lebih dari itu, pariwisata merupakan suatu fenomena kompleks yang memerlukan penetapan pemahaman yang jelas.

2.1.1 Wisatawan

Kata 'wisatawan' merujuk pada orang. Perbedaannya dengan yang bukan wisatawan adalah pada perilakunya, sehingga penetapan wisatawan didasarkan pada prasangka perilakunya yang dapat diamati. Pitana (2009) menyebutkan terdapat empat atribut yang esensial dalam konteks perilaku wisatawan yang bisa diterima secara luas, yaitu: (1) wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan yang jauh dari tempat tinggalnya untuk mengunjungi tempat atau negara lain, (2) setiap perjalanan wisata memiliki durasi minimum tetapi bersifat sementara dan bukan untuk menetap di tempat baru yang dituju, (3) perilaku wisata muncul dalam waktu luang, dan (4) perjalanan wisata melibatkan hubungan emosional antara wisatawan dengan beberapa karakteristik tempat yang dikunjungi.

Leiper (1990) dalam Pitana (2009) membuat kriteria perilaku wisatawan berdasarkan konsep definitif, sebagai berikut:

“A tourist can be defined, in behavioral terms, as a person traveling away from their normal residential region for a temporary period, staying away at least one night but not permanently, to the extent that behavior involves a search for leisure experiences from interaction with features or environmental characteristics of the place(s) they choose to visit”
(Leiper, 1990:10).

Definisi mengenai wisatawan secara teknis biasanya digunakan dalam perspektif kepentingan tujuan bisnis, organisasi, statistik, hukum dan sebagainya dalam suatu wilayah atau negara. Salah satu contoh definisi wisatawan secara teknis adalah definisi yang dibuat oleh Organization of Economic Cooperation Development (OECD) dengan menggunakan istilah yang dikeluarkan oleh The Committee of Statistical Experts of the League of Nations pada tahun 1937 yang menyatakan bahwa:

- a. Wisatawan adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara selain negara di mana dia biasanya tinggal, dan dengan periode setidaknya-tidaknya 24 jam.
- b. Berikut ini adalah yang dapat dianggap sebagai wisatawan, yaitu:
 - Orang-orang yang bepergian untuk tujuan bersenang-senang, alasan keluarga, untuk tujuan kesehatan dan lain sebagainya.
 - Orang-orang yang bepergian untuk mengadakan pertemuan atau mewakili kedudukan sebagai diplomat, misi keagamaan, dan orang-orang yang bepergian dengan alasan dagang.
 - Orang-orang yang singgah dalam pelayaran lautnya, sekalipun bila mereka tinggal kurang dari 24 jam.
- c. Berikut ini adalah yang tidak dapat dianggap sebagai wisatawan, yaitu:
 - Orang yang datang baik dengan dasar kontrak maupun tidak, untuk mencari kerja atau yang bekerja pada suatu aktivitas usaha di negara tersebut.
 - Orang lain yang datang untuk menetap menjadi penduduk di negara tersebut.
 - Pelajar yang mondok di rumah pemonjokan atau asrama.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa secara teknis, pengertian mengenai wisatawan seharusnya memuat beberapa hal, diantaranya: (1) tempat tinggal asal wisatawan dan lokasi tujuan wisatanya, (2) jangka waktu dan jarak perjalanan, (3) tujuan dan kepentingan melakukan perjalanan.

2.1.2 Pariwisata

Pariwisata memiliki definisi yang berbeda-beda karena konsepnya yang sangat multidimensional. Berdasarkan perspektifnya masing-masing sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, para praktisi dan ahli juga mendefinisikan pariwisata secara berbeda-beda.

Mathieson dan Wall (1982) mendefinisikan pariwisata sebagai serangkaian aktivitas berupa aktivitas perpindahan orang untuk sementara waktu ke suatu tujuan di luar tempat tinggal maupun tempat kerjanya yang biasa, aktivitas yang dilakukannya selama tinggal di tempat tujuan tersebut, dan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhannya baik selama dalam perjalanan maupun di lokasi tujuannya. Sedangkan batasan pariwisata yang diberikan oleh Yoeti (2008) adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam di luar mencari nafkah.

World Tourism Organization (WTO) mendefinisikan pariwisata sebagai suatu aktivitas perjalanan ke suatu tempat dan tinggal di luar lingkungan mereka sehari-hari tidak lebih dari setahun dan bertujuan untuk istirahat atau bersenang-senang, bisnis, dan tujuan lainnya yang tidak terkait dengan aktivitasnya sehari-hari selama mereka berada di daerah tujuan wisata.

Pengertian pariwisata yang lebih menekankan pada aspek ekonomi dapat dilihat dalam definisi yang dibuat oleh Salah Wahab (1976), yaitu pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup serta menstimulasi sektor-sektor lain di daerah yang menerima wisatawan. Ia memandang pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks karena meliputi industri-industri dalam arti yang klasik seperti industri kerajinan dan cinderamata, penginapan, transportasi dan lain-lain.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli dan praktisi di atas, dapat ditarik benang merah bahwa dalam pariwisata terdapat beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Terdapat aktivitas perjalanan manusia dari tempat asal ke lokasi tujuan wisata dan sebaliknya.
2. Tujuan utama dari perjalanan tersebut adalah selain dari mencari pekerjaan.
3. Status di tempat yang dituju adalah hanya untuk tinggal sementara dan tidak untuk menetap.

2.1.3 Industri Pariwisata

Aktivitas pariwisata mendorong dan menumbuhkan kegiatan-kegiatan dalam bidang konsumsi dan produksi barang dan jasa yang diperlukan oleh orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan pariwisata tersebut.

Penggunaan istilah 'industri pariwisata' memiliki keterbatasan dalam hal pengertian dan banyak digunakan hanya untuk memberikan daya tarik agar pariwisata dapat dianggap sebagai sesuatu yang berarti bagi perekonomian suatu negara, terutama karena *multiplier effect* yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata tersebut. Sebagai suatu industri, pariwisata sulit untuk diukur karena tidak memiliki standar nomor klasifikasi industri, namun keberadaannya dapat dijelaskan dengan adanya sekelompok perusahaan yang kelangsungannya tergantung dari wisatawan yang berkunjung. Perusahaan-perusahaan inilah yang secara langsung memberikan layanan kepada wisatawan. Tanpa kelompok perusahaan ini wisatawan tidak akan memperoleh kenyamanan, kepuasan, dan keamanan selama berwisata. Demikian pula sebaliknya tanpa wisatawan, kelompok perusahaan ini tidak akan berkembang keberadaannya.

Pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, namun didukung dan ditunjang oleh rangkaian sektor atau usaha yang menghasilkan barang atau jasa yang berbeda satu sama lainnya. Pasal 14 UU No. 10 tahun 2009 menyebutkan bahwa yang termasuk dalam usaha pariwisata antara lain berupa:

1. Daya tarik wisata
2. Kawasan pariwisata
3. Jasa transportasi wisata
4. Jasa perjalanan wisata
5. Jasa makanan dan minuman
6. Penyediaan akomodasi
7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
9. Jasa informasi pariwisata
10. Jasa konsultan pariwisata
11. Jasa pramuwisata
12. Wisata tirta
13. Spa

Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa industri-industri yang dianggap masuk dalam sektor usaha pariwisata adalah akomodasi, jasa agen perjalanan, restoran dan kafetaria, perusahaan angkutan, industri kerajinan cinderamata serta obyek dan atraksi wisata itu sendiri.

2.2 Pengeluaran Pemerintah

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen untuk melakukan redistribusi pendapatan. Alat yang digunakan dalam kebijakan ini adalah pajak dan pengeluaran pemerintah. Di negara yang sedang berkembang, peranan kebijakan fiskal sangat penting saat kebijakan moneter belum berjalan seperti yang diinginkan.

Cerminan kebijakan pemerintah terdapat pada pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah merupakan wujud dari biaya pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah (G) memegang peranan penting dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara disamping konsumsi (C), investasi (I), dan nilai ekspor bersih (X-M).

Salah satu hal yang menyebabkan pemerintah turun tangan dalam perekonomian adalah adanya kegagalan pasar, meskipun tidak jarang intervensi pemerintah ini justru berujung pada kegagalan pemerintah (*government failure*). Kegagalan pemerintah tersebut biasanya disebabkan oleh informasi yang terbatas, pengawasan yang terbatas pada birokrat dan swasta, serta hambatan dalam proses politik. Jika dibandingkan dengan negara maju, peran pemerintah di negara berkembang lebih besar porsinya dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan peran pemerintah di negara berkembang terutama disebabkan oleh adanya hambatan dalam pengadaan infrastruktur, tingkat tabungan dan investasi masyarakat yang rendah, modernisasi pembangunan ekonomi, serta bantuan luar negeri untuk proyek-proyek pemerintah (Panjaitan, 1996).

Di Indonesia, pengeluaran pemerintah dibedakan menurut dua klasifikasi (Susanti, dkk, 2007), yaitu:

- a. Pengeluaran rutin pemerintah, yaitu pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Yang termasuk dalam kategori ini adalah belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan utang, dan lain-lain.
- b. Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran untuk pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dan gedung-gedung. Sedangkan non fisik seperti pembelanjaan untuk pengembangan sumber daya manusia.

2.3 Distribusi Pendapatan dan Ketenagakerjaan

Perbedaan pendapatan timbul akibat adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang menguasai sumber daya dan faktor produksi yang lebih besar akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang menguasai faktor produksi yang lebih sedikit. Teori '*trickle down effect*' menyatakan bahwa perbedaan kepemilikan awal faktor produksi tersebut akan dapat dikurangi melalui suatu proses penyesuaian yang

otomatis. Dalam teori ini, hasil pembangunan akan menetes ke bawah dan menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Bila setelah proses tersebut masih terdapat perbedaan pendapatan yang cukup timpang, maka menurut Keynes dapat dilakukan penyesuaian melalui sistem perpajakan dan subsidi.

Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, terdapat beberapa indikator yang digunakan, diantaranya adalah koefisien Gini dan cara perhitungan yang digunakan oleh World Bank. Menurut perhitungan berdasarkan angka koefisien Gini, suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin merata bila nilainya mendekati nol, sedangkan makin tidak merata bila nilainya mendekati satu.

Cara perhitungan lain adalah dengan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh World Bank. Menurut World Bank, ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu negara/wilayah dapat dilihat dari besarnya kontribusi 40 persen penduduk termiskin. Pengukuran tersebut dapat dilihat dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Adapun kriteria yang dipergunakan oleh World Bank (Susanti, dkk, 2007) tersebut adalah:

- a. Bila kelompok 40 persen penduduk termiskin pengeluarannya lebih kecil daripada 12 persen dari keseluruhan pengeluaran, maka dikatakan bahwa daerah/negara yang bersangkutan memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi.
- b. Bila kelompok 40 persen penduduk termiskin pengeluarannya berada di antara 12 persen sampai 17 persen dari keseluruhan pengeluaran, maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan yang terjadi adalah moderat.
- c. Bila kelompok 40 persen penduduk termiskin pengeluarannya lebih dari 17 persen dari keseluruhan pengeluaran, maka dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi adalah rendah.

Ukuran kemiskinan menekankan pada keadaan rumah tangga yang berada di posisi bawah pada distribusi pendapatan, sedangkan ukuran ketimpangan memiliki konsep yang lebih luas. Ketimpangan didefinisikan terhadap seluruh populasi dan tidak hanya pada penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Pemahaman terhadap karakteristik kemiskinan dapat membantu pembuat kebijakan publik dalam menentukan strategi pertumbuhan bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Informasi yang baik dan terkini mengenai profil masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dapat membantu pengambil kebijakan dalam merancang kebijakan yang efektif dan berdampak besar pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Survei rumah tangga merupakan instrumen yang sering digunakan dalam pengumpulan data untuk mendukung analisis kemiskinan dan ketimpangan.

World Bank memisahkan kegiatan penanggulangan kemiskinan menjadi tiga kelompok, yaitu menghidupkan peluang, memfasilitasi pemberdayaan dan memperluas jaminan⁴. Menurut World Bank, syarat utama dalam menghidupkan peluang bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah adalah adanya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pada sebagian besar kasus, kebijakan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi sebenarnya menguntungkan penduduk miskin sehingga kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan tersebut merupakan kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk menciptakan peluang-peluang bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah meningkatkan investasi swasta yang efektif; liberalisasi perdagangan; membangun aset manusia, fisik, alam, dan finansial yang dimiliki penduduk miskin; mengatasi ketimpangan aset menurut jender, etnis, dan ras; serta penyediaan infrastruktur dan informasi bagi wilayah-wilayah miskin. Kebijakan yang membangun aset bagi masyarakat miskin dapat dilakukan dengan kegiatan seperti meningkatkan pengeluaran publik untuk pelayanan sosial, reformasi dan privatisasi pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam perencanaan dan pengawasan.

Menurut World Bank, pemberdayaan masyarakat miskin dapat diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi: pembangunan yang inklusif berlandaskan hukum dan politik yang legal, mencakup transparansi, mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis dan partisipatif; memperkuat mekanisme pengawasan kinerja administrasi publik melalui transparansi

⁴ Kesimpulan World Bank dalam World Development Report 2000-2001

anggaran; mempromosikan desentralisasi pembangunan yang inklusif; meningkatkan kesetaraan jender; mengatasi hambatan dalam struktur dan institusi sosial; serta mendukung modal sosial masyarakat miskin. Sedangkan kebijakan perluasan jaminan dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat miskin mengatasi resiko; mencegah dan merespon gejolak makro, keuangan dan bencana alam; mencegah konflik sosial; serta mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat.

Selain itu, Todaro (2006) menyatakan bahwa serangkaian kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan adalah:

1. Perbaikan distribusi pendapatan fungsional melalui serangkaian kebijakan yang khusus dirancang untuk mengubah harga-harga relatif faktor produksi.
2. Perbaikan distribusi ukuran melalui redistribusi progresif kepemilikan aset-aset.
3. Pengurangan distribusi ukuran golongan atas melalui pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif.
4. Pembayaran transfer secara langsung dan penyediaan berbagai barang dan jasa publik.

Ketimpangan pendapatan juga dapat terjadi akibat ketidaksempurnaan pasar. Gangguan-gangguan yang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar tidak hanya terjadi karena perbedaan dalam kepemilikan sumber daya, melainkan juga diakibatkan oleh informasi yang tidak sempurna dan adanya intervensi pemerintah yang justru memperlebar ketimpangan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi penting bagi masyarakat karena dapat menciptakan berbagai kesempatan atau peluang. Namun, kemungkinan yang terjadi adalah tidak semua golongan masyarakat dapat memanfaatkan peluang dan memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi, terutama bagi golongan masyarakat berpendapatan rendah. Pemberdayaan merupakan hal yang penting bagi penduduk berpendapatan rendah untuk mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang diciptakan oleh adanya pertumbuhan.

Pada akhirnya, kemampuan rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan akan bergantung pada upah dari pekerjaan yang dilakukan sehingga penting untuk menguji hubungan antara kemiskinan dan jenis pekerjaan anggota rumah tangga yang berada dalam usia kerja. Kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan kemiskinan secara tepat dan langsung melalui peningkatan kemampuan memperoleh pendapatan, seharusnya ditargetkan pada sektor-sektor dimana masyarakat miskin banyak bekerja.

Dalam pembahasan aspek ketenagakerjaan, penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berusia sepuluh tahun ke atas yang terdapat pada suatu negara atau wilayah. Penduduk usia kerja ini terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas tenaga kerja yang bekerja dan tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk dalam bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja karena alasan masih dalam proses pendidikan, mengurus rumah tangga tanpa dibayar, atau karena kemampuannya memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa harus bekerja.

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja adalah rasio antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Indikator ini biasanya digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Pada umumnya, tenaga kerja dikelompokkan berdasarkan lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Berdasarkan lapangan pekerjaan, tenaga kerja dikelompokkan menurut sektor-sektor perekonomian, yaitu:

- a. Pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan.
- b. Pertambangan dan penggalian.
- c. Industri manufaktur.
- d. Listrik, gas, dan air minum.
- e. Bangunan/infrastruktur.
- f. Perdagangan, hotel, dan restoran.
- g. Transportasi dan komunikasi.

- h. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan.
- i. Jasa kemasyarakatan.
- j. Lainnya.

2.4 Dampak Pariwisata Terhadap Pembangunan Ekonomi

Fisher dan Clark (1940) menyatakan bahwa perekonomian suatu negara mempunyai tiga tahap perkembangan produksi, yaitu;

1. Tahap primer, dimana pertanian menjadi sektor yang sangat berperan dalam perekonomian. Negara yang berada dalam tahap ini biasanya adalah negara yang belum berkembang.
2. Tahap sekunder, dimana peran sektor industri semakin meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita penduduknya. Negara yang berada dalam tahap ini biasanya adalah negara yang sedang berkembang.
3. Tahap tersier, dimana peran terbesar pada GDP suatu negara didominasi oleh sektor jasa. Negara yang telah mencapai pada tahap ini biasanya adalah negara maju.

Berdasarkan tiga tahap perkembangan ekonomi di atas, Chenery dan Syrquin (1975) kemudian mengembangkan teori pembangunan ekonomi dengan menitikberatkan pada perubahan struktur dalam proses perubahan ekonomi, industri, dan struktur institusi perekonomian. Penelitian yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin ini menguraikan transformasi struktur produksi dari negara-negara berpenghasilan rendah, berpenghasilan menengah ke bawah, dan berpenghasilan menengah ke atas sejak tahun 1950-1983 yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita dalam perekonomian suatu negara akan bergeser sejalan dengan pergeseran struktural pada perekonomian negara dari sektor pertanian menuju sektor industri, yang selanjutnya beralih ke sektor jasa.

Selain itu, Cohen dalam Windari (2005) menyatakan bahwa perkembangan ekonomi sebaiknya tidak hanya diinterpretasikan dalam konteks pergeseran struktur produksi suatu negara, melainkan juga dalam pengertian

proses dinamika yang terjadi pada kegiatan-kegiatan inti (*core activities*) dan kegiatan pendukung (*supporting activities*). Dalam kegiatan pendukung tersebut perlu dilihat adanya keterkaitan dengan kegiatan inti baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagian besar negara-negara di dunia mengakui bahwa pariwisata dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara. Pada umumnya, pemerintahan negara-negara di dunia menerima pariwisata sebagai sesuatu yang positif dan sebagian besar kebijakan pariwisata dibuat untuk memperluas industri pariwisatanya. Pemerintahan di setiap tingkat, dari tingkat internasional hingga tingkat regional berperan lebih aktif dalam mengembangkan pariwisata sebagai alat pembangunan.

Undang-Undang RI No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Dalam UU ini, pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

Menurut Yoeti (2008) faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan pariwisata di abad ke-21 ini adalah:

1. *Three 'T' Revolution*

Kemajuan teknologi transportasi, telekomunikasi dan *tourism* menyebabkan segalanya menjadi mudah bagi orang-orang untuk melakukan perjalanan wisata. Kecepatan dan kapasitas pesawat

penumpang yang semakin meningkat, transportasi darat dan laut yang semakin nyaman, teknologi telekomunikasi yang semakin canggih sehingga informasi dengan cepat dan mudah diperoleh, akan mendorong orang-orang untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia.

2. *Hybrid*

Diperkirakan pada waktunya nanti, orang-orang akan melakukan perjalanan dengan pola baru. Peserta MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) akan membawa serta keluarga karena perjalanan bisnisnya digabung dengan kesempatan liburan keluarga sehingga kebanyakan dari mereka akan menambah waktu tinggalnya.

3. *Leisure Time*

Kecenderungan di dunia ini semakin banyaknya waktu libur yang tersedia sehingga kesempatan untuk melakukan kunjungan ke daerah wisata semakin besar.

4. *Discretionary Income*

Peningkatan tabungan keluarga sebagai akibat peningkatan pendapatan keluarga, dimana jika sebagian kelebihan pendapatan tersebut digunakan untuk berwisata maka tidak akan mengganggu kebutuhan sehari-hari.

5. *Paid Vacations*

Kecenderungannya saat ini semakin banyak perusahaan memberikan tunjangan berupa uang cuti kepada karyawannya untuk berlibur.

6. *Status and Prestige Motivation*

Motivasi yang bersifat emosional ini didorong oleh keinginan seseorang untuk menjaga prestigenya. Agar dianggap mampu, seseorang harus melakukan sesuatu seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, seperti misalnya melakukan perjalanan wisata.

World Travel and Tourism Council (1993) dalam Lundberg (1997) menyatakan bahwa terdapat tiga dampak dari pariwisata terhadap perekonomian yaitu:

1. Dampak langsung, merupakan perubahan dalam penjualan, kesempatan kerja dan pendapatan pada berbagai bisnis sebagai suatu

hasil dari pembelian secara langsung berbagai barang dan jasa oleh wisatawan.

2. Dampak tidak langsung, merupakan perubahan dalam penjualan, kesempatan kerja dan pendapatan yang ditimbulkan secara tidak langsung pada berbagai bisnis begitu mata uang asing wisatawan itu dibelanjakan kembali.
3. Dampak rurutan, merupakan bagian dari pengeluaran konsumsi yang berubah dengan perubahan PDB riil yang dikurangi impor.

World Tourism Organization (WTO) juga mengidentifikasikan dampak positif pariwisata sebagai:

1. Meningkatnya permintaan akan produk pertanian lokal
2. Memacu pengembangan lokasi atau lahan yang kurang produktif
3. Menstimulasi minat dan permintaan akan produk eksotik dan tipikal dari suatu wilayah atau negara
4. Meningkatkan jumlah dan permintaan akan produk perikanan dan laut
5. Mendorong pengembangan wilayah dan penciptaan kawasan ekonomi baru
6. Menghindari konsentrasi penduduk dan penyebaran aktivitas ekonomi
7. Penyebaran infrastruktur ke pelosok wilayah
8. Manajemen pengelolaan sumber daya sebagai sumber pendapatan bagi otoritas lokal.

Menurut Dorodjatun dalam Yoeti (2008), tujuan pengembangan pariwisata bukan hanya sekedar peningkatan perolehan devisa bagi negara, pariwisata diharapkan sebagai katalisator pembangunan. Menurutnya ada delapan keuntungan yang bisa diperoleh dari pembangunan pariwisata yaitu: (1) peningkatan kesempatan berusaha, (2) peningkatan kesempatan kerja, (3) peningkatan penerimaan pajak, (4) peningkatan pendapatan nasional (5) percepatan poses pemerataan pendapatan nasional, (6) peningkatan nilai tambah produk hasil kebudayaan, (7) memperluas pasar produk dalam negeri, (8) memberikan dampak *multiplier effect* dalam perekonomian sebagai akibat pengeluaran wisatawan, investor, maupun perdagangan dalam negeri.

Universitas Indonesia

Mubyarto dalam Yoeti (2008) mengatakan bahwa pariwisata merupakan suatu sektor ekonomi yang terbukti mampu mengentaskan kemiskinan pada suatu daerah. Menurutnya, pembangunan industri pariwisata yang mampu mengentaskan kemiskinan adalah industri pariwisata yang mempunyai *trickle down effect* bagi masyarakat setempat. Sebagai contoh, pada tahun 1960-an, Yogyakarta tergolong sebagai daerah termiskin peringkat ketiga. Namun, setelah lebih dari 30 tahun industri pariwisata dikembangkan di daerah ini, Yogyakarta berada pada urutan ketiga sebagai daerah yang makmur dengan tingkat pengeluaran riil per kapita/tahun sebesar Rp 610.836. Demikian halnya dengan Provinsi Bali. Jika pada tahun 1984 dampak pariwisata terhadap perekonomian Bali menyumbang 10,3% terhadap PDRB dengan angka pengganda pendapatan sebesar 1,22; maka sepuluh tahun kemudian (1994) sumbangan pariwisata terhadap PDRB menjadi 45,3% dengan angka pengganda pendapatan yang juga meningkat menjadi 1,46 (Erawan dalam Yoeti, 2008).

Pemilihan sektor pariwisata sebagai salah satu alternatif pengentasan kemiskinan cukup beralasan. Pariwisata memberikan andil dan kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil di pedesaan dimana pariwisata dikembangkan. Usaha pengentasan kemiskinan melalui pariwisata dapat dilihat dalam keterlibatan langsung masyarakat berpendapatan rendah pada program-program pengembangan pariwisata melalui pemanfaatan hasil kerajinan tangan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, seni, dan budaya tradisional serta pengembangan desa wisata.

Saat ini pariwisata menduduki peringkat kedua penghasil devisa negara setelah migas. Diproyeksikan pada waktu yang akan datang, pariwisata sebagai industri akan menggantikan posisi migas sebagai penghasil devisa negara terbesar, karena kecenderungan produksi migas yang semakin menurun kontribusinya terhadap perekonomian. Pariwisata sebagai industri mencakup aspek-aspek yang luas dan terkait dengan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Di Bali, dapat dilihat bahwa seiring berkembangnya pariwisata di daerah ini, sentra-sentra industri kecil juga mengalami pertumbuhan, dimana kegiatan ini sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat penghasilan rendah. Selain di Bali,

sentra-sentra industri kecil ini juga tumbuh di daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata lainnya seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lombok (NTB). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dampak pengembangan kepariwisataan terutama pengeluaran wisatawan terhadap perekonomian dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dalam mengembangkan pariwisata sebagai industri akan terjadi peningkatan dalam kesempatan berusaha dan bekerja, penerimaan pajak, pendapatan masyarakat, dan memperkuat posisi neraca pembayaran (Yoeti, 2008).

Clement (1986) dalam Arief (2009) menyatakan bahwa selain pengaruh yang ditimbulkan sebagai akibat dari pengeluaran wisatawan asing, terdapat lima pengeluaran lainnya yang berkaitan erat dengan pariwisata yang berdampak pada perekonomian, yaitu:

1. Pengeluaran wisatawan domestik
2. Investasi pada sektor pariwisata
3. Pengeluaran pemerintah pada sektor pariwisata
4. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada sektor pariwisata
5. Pengeluaran wisatawan outbond

Selanjutnya Clement juga mengatakan bahwa indikasi keberhasilan pengembangan pariwisata diukur dari besar atau kecilnya nilai pelipatgandaan (*turnover*) yang terlihat dari besar kecilnya nilai koefisien pengganda sebagai akibat pengaruh unit uang yang dibelanjakan terhadap kegiatan perekonomian wilayah negara yang dikunjungi. Jika nilai koefisien penggandanya besar, maka semakin besar pula pengaruh pariwisata terhadap perekonomian negara atau wilayah yang bersangkutan dan begiu pula sebaliknya.

Efek pengganda (*multiplier effect*) pada industri pariwisata terjadi karena uang yang dibelanjakan wisatawan selalu beredar dan berpindah tangan melalui transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di wilayah dimana uang tersebut dibelanjakan. Uang tersebut dianggap tidak lagi memiliki pengaruh terhadap perekonomian setempat apabila hilang dari peredaran atau tidak lagi berpindah tangan. Nilai koefisiennya akan semakin besar apabila uang tersebut semakin

cepat berpindah tangan karena pengaruh uang tersebut terhadap perekonomian setempat akan semakin besar. Pengukuran terhadap besar kecilnya pengaruh uang yang dibelanjakan itu dilakukan setelah melalui beberapa kali transaksi dalam periode satu tahun.

Indonesia memiliki banyak daerah yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata. Selain kecantikan dan keunikan bentangan alamnya yang luas, potensi kekayaan budaya juga patut diperhitungkan karena Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dalam berbagai suku-suku yang mendiami wilayahnya. Keberadaan infrastruktur yang menjadi sarana aksesibilitas yang memadai mampu menjadi pendukung pengembangan daerah di samping peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana utama kepariwisataan.

Dalam UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional, dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Rencana induk pembangunan kepariwisataan tingkat nasional diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan tingkat provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan rencana induk tersebut dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dimana isi dari rencana induk meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata. Diharapkan, baik pemerintah pusat maupun daerah mendorong penanaman modal baik modal dalam negeri maupun asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang ada.

Pada pasal 23 UU No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.

2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum
3. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas

Yoeti (2008) menyatakan bahwa untuk menghindari terjadinya urbanisasi yaitu mengalirnya pencari kerja ke kota-kota besar, pemerintah daerah perlu mengembangkan industri pariwisata di daerah sehingga mampu menyediakan lapangan pekerjaan dengan banyaknya proyek pariwisata di daerah. Namun, masalah yang sering dihadapi adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk lokal sehingga tenaga profesional dan terampil terpaksa perlu didatangkan dari kota-kota besar. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial sehingga mengakibatkan gagalnya proyek kepariwisataan di daerah tersebut. Idealnya, pengembangan dan pembangunan pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi investor, wisatawan, serta kesejahteraan bagi penduduk setempat.

Nirwandar (2009), menyatakan bahwa serangkaian tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kepariwisataan nasional seharusnya berbasis pada beberapa strategi, yaitu:

1. Kebijakan fiskal, dengan jalan memberikan berbagai kebijakan fiskal seperti *tax holiday*, pendukung permodalan, dan bunga pinjaman yang kompetitif.
2. Kebijakan investasi, melalui peraturan perundangan baik di tingkat nasional maupun daerah yang kondusif terhadap pembangunan usaha baru maupun pengembangan yang usaha pariwisata yang telah ada.
3. Pengembangan infrastruktur, dengan memperbesar aksesibilitas menuju dan dalam destinasi pariwisata melalui pembangunan sarana

fisik jalan, pelabuhan, bandara, telekomunikasi dan sarana fisik penunjang pariwisata lainnya.

4. Pengembangan sumber daya manusia, melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal guna mengembangkan kompetensi masyarakat dalam pelayanan dan penyediaan barang dan jasa bagi wisatawan.
5. Koordinasi lintas sektor, melalui pengembangan kemitraan seluruh *stakeholder* dalam pembangunan kepariwisataan.

Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu bentuk pembangunan ekonomi di daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta untuk meningkatkan investasi di suatu daerah, dimana hal ini banyak bergantung kepada prasarana dan sarana pariwisata yang tersedia.

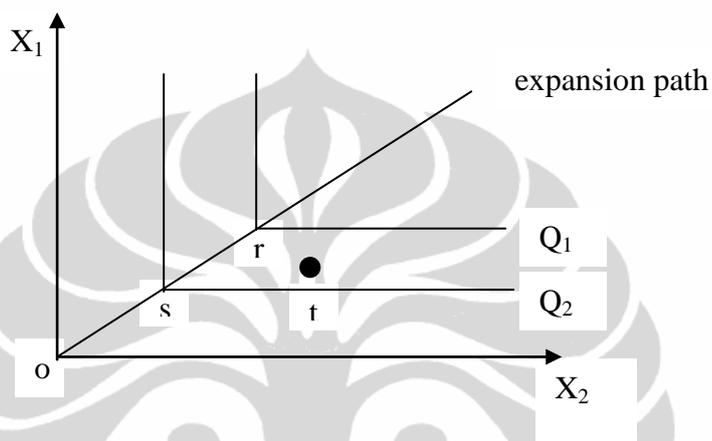
Jika usaha pariwisata dikembangkan dengan baik, maka dengan sendirinya akan memberikan dampak positif bagi suatu daerah. Pembangunan sarana dan prasarana di suatu daerah menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang terserap. Selain itu berkembangnya pariwisata di suatu daerah diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang selanjutnya akan menimbulkan permintaan baru terhadap hasil-hasil produksi masyarakat setempat.

2.5 Analisis Input-Output

Analisis input-output merupakan suatu peralatan analisis keseimbangan umum. Inti dari kerangka dasar model input-output ini menunjukkan keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya baik dalam suatu perekonomian ataupun dalam suatu sistem pada suatu periode tertentu. Baumol (1972) dalam Nazara (2005) menyatakan bahwa analisis input-output sebagai usaha untuk memasukkan fenomena keseimbangan umum dalam analisis empiris sisi produksi. Keseimbangan dalam analisis input-output didasarkan arus transaksi antara pelaku perekonomian dimana penekanannya pada sisi produksi.

Produksi dalam analisis input mengikuti fungsi produksi Leontif yang bersifat *constant return to scale*, yaitu peningkatan input dengan persentase

tertentu akan meningkatkan output dengan persentase yang sama. Hal ini berarti, bahwa dalam analisis input-output tidak mengenal adanya peningkatan teknologi yang bisa melipatgandakan output (Q) lebih besar dari pelipatgandaan input (X_1 , X_2). Menurut Leontif, proses produksi yang optimal di sepanjang *expansion path*-nya dilakukan dengan proporsi input yang konstan. *Isoquant* fungsi produksi Leontif memiliki bentuk seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Isoquant Fungsi Produksi Leontif

Pada Gambar 2.1, terdapat dua buah *Isoquant* yang masing-masing menunjukkan output produk senilai Q_1 dan Q_2 . Di sepanjang *isoquant* hanya ada satu titik optimal produksi, yaitu titik r untuk output senilai Q_1 dan titik s untuk output senilai Q_2 . Pada berbagai tingkat harga relatif input, kedua titik ini selalu menjadi titik produksi yang optimal. Titik t tidak akan menghasilkan output yang lebih besar dari Q_2 meskipun menggunakan input X_2 yang lebih besar dibandingkan titik s , sehingga titik t bukanlah titik produksi yang optimal. Titik s dan r adalah bagian dari *expansion path* yang linier, maka proporsi input X_1 terhadap X_2 nilainya selalu konstan. Dalam analisis input-output, proporsi input ditunjukkan oleh nilai koefisien teknologi.

Penggunaan model input output antara lain digunakan untuk kebutuhan berikut ini (Achjar, 1997):

- a. Analisis dampak, digunakan untuk memperkirakan dampak dari perubahan permintaan akhir (final demand) terhadap berbagai output

sektor produksi, nilai tambah, tingkat penerimaan pajak, kebutuhan tenaga kerja dan sebagainya.

- b. Alat untuk peramalan dan perencanaan, dimana pengaruh permintaan akhir terhadap output dapat diestimasi sehingga model ini dapat digunakan sebagai prediksi untuk perencanaan pembangunan, baik dalam makro sektoral maupun mikro regional.
- c. Memberikan gambaran mengenai sektor-sektor yang mempunyai pengaruh paling besar dan peka terhadap pertumbuhan ekonomi.
- d. Digunakan untuk mengamati komposisi penyediaan dan penggunaan barang atau jasa sehingga mempermudah analisis tentang kebutuhan impor dan kemungkinan substitusinya.

2.5.1 Tabel Input-Output, Koefisien Input dan Matriks Kebalikan

Tabel input-output pada dasarnya memuat informasi tentang transaksi barang dan jasa yang terjadi antar industri atau sektor ekonomi di suatu wilayah perekonomian pada suatu periode tertentu. Tabel input-output disusun berdasarkan data ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah geografis tertentu (negara, provinsi, kabupaten/kota, dan sejenisnya) untuk suatu periode tertentu, biasanya tahunan. Informasi yang ada selanjutnya disajikan dalam bentuk matriks baris dan kolom. Isian sepanjang baris menunjukkan alokasi output dan isian menurut kolom menunjukkan pemakaian input dalam proses produksi. Matriks ini menggambarkan nilai arus (transaksi) barang dan jasa antar sektor ekonomi. Besaran arus itu menggambarkan tingkat keterkaitan antar sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian.

Model input-output mampu memberi gambaran menyeluruh mengenai hal-hal berikut (BPS, 2008):

1. Struktur perekonomian yang mencakup struktur output dan nilai tambah masing-masing kegiatan ekonomi di suatu wilayah.
2. Struktur input antara (intermediate input), yaitu penggunaan barang dan jasa oleh kegiatan produksi di suatu wilayah.

3. Struktur penyediaan barang dan jasa, baik yang berupa produksi dalam negeri maupun barang-barang yang berasal dari impor.
4. Struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaan oleh kegiatan produksi maupun permintaan akhir untuk konsumsi, investasi dan ekspor.

Kerangka dasar model input-output terdiri atas empat kuadran seperti yang tersaji pada Gambar 2.2

Kuadran I : Transaksi antar kegiatan ($n \times n$)	Kuadran II : Permintaan akhir ($n \times m$)
Kuadran III : Input primer sektor produksi ($p \times n$)	Kuadran IV : Input primer permintaan akhir ($p \times m$)

Sumber: BPS (2008)

Gambar 2.2 Kerangka Dasar Tabel Input-Output

Kuadran pertama menunjukkan arus barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan oleh sektor-sektor ekonomi dalam proses produksi di suatu perekonomian. Kuadran ini menunjukkan distribusi penggunaan barang dan jasa untuk suatu proses produksi sehingga disebut juga sebagai transaksi antara (intermediate transaction). Kuadran kedua menunjukkan permintaan akhir (final demand) dan impor. Permintaan akhir yaitu penggunaan barang dan jasa bukan untuk proses produksi yang biasanya terdiri atas konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan persediaan (stock), dan ekspor. Kuadran ketiga memperlihatkan input primer dari sektor-sektor produksi, yaitu semua balas jasa dari setiap faktor produksi yang biasanya meliputi upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Sedangkan kuadran keempat memperlihatkan input primer yang langsung didistribusikan ke sektor-sektor permintaan akhir. Tiap kuadran dinyatakan dalam bentuk matriks, masing-masing dengan dimensi seperti tertera pada Gambar 2.3.

Dengan demikian maka total output sektor i (X_i) adalah jumlah output sektor i yang digunakan sebagai input antara oleh sektor j ($j = 1, 2, \dots, n$) ditambah dengan permintaan akhir sektor i , yang dirumuskan dalam bentuk:

$$x_{ij} + F_i = X_i \quad (2.1)$$

dimana:

x_{ij} = banyaknya output sektor (i) yang digunakan sebagai input sektor (j)

F_i = permintaan akhir terhadap output sektor (i)

X_i = total output sektor (i)

Sektor	Permintaan Antara				Permintaan Akhir	Total Output
	1	2	...	N		
1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1n}	F_1	X_1
2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2n}	F_2	X_2
.
.
N	x_{n1}	x_{n2}	...	x_{nn}	F_n	X_n
Input Primer	V_1	V_2	...	V_n		
Total Input	X_1	X_2	...	X_n		

Sumber: BPS (2008)

Gambar 2.3 Bentuk Umum Tabel Input-Output

Jika mengacu pada konsep keseimbangan umum, maka total output suatu sektor haruslah sama dengan total input sektor tersebut. Dengan demikian total output sektor 1 bernilai sama dengan total input sektor 1 yaitu X_1 . Input yang diperlukan dalam proses produksi sektor 1 bukan hanya input antara, tetapi diperlukan juga input lain yang disebut input primer. Dengan demikian maka total input sektor j (X_j) adalah jumlah seluruh output yang berasal dari sektor i ($i = 1, 2, \dots, n$) yang digunakan sebagai input antara oleh sektor j ditambah dengan input primer sektor j, yang dirumuskan dalam bentuk:

$$x_{ij} + V_j = X_j \quad (2.2)$$

dimana:

x_{ij} = banyaknya output sektor (i) yang digunakan sebagai input sektor (j)

V_j = input primer sektor (j)

X_j = total input sektor (j)

Untuk memulai suatu analisis yang menggunakan alat analisis input-output, selain memerlukan tabel transaksi sebagai tabel dasar, model ini juga memerlukan tabel koefisien input dan tabel matriks kebalikan (*inverse matrix*). Koefisien input adalah proporsi input antara yang berasal dari output sektor i terhadap total input sektor j yang diperoleh dengan rumus berikut:

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j} \quad (2.3)$$

dimana:

a_{ij} = koefisien input antara (koefisien teknologi) dari output sektor i yang digunakan oleh kegiatan produksi sektor j

x_{ij} = banyaknya output sektor i yang digunakan sebagai input oleh kegiatan produksi sektor j.

X_j = total input kegiatan sektor j.

Selain itu, juga terdapat koefisien input primer yang menunjukkan peranan dan komposisi dari upah dan gaji, surplus usaha (keuntungan), pajak tak langsung, dan penyusutan. Koefisien input primer dirumuskan sebagai berikut:

$$v_j = \frac{V_j}{X_j} \quad (2.4)$$

dimana:

X_j = Total input yang dibutuhkan sektor j = total output sektor i (untuk $i=j$)

V_j = Input primer (nilai tambah) sektor j.

v_j = koefisien input primer.

Susunan persamaan pada tabel input-output dapat disederhanakan ke dalam persamaan berikut:

$$AX + F = X \quad (2.5)$$

$$X - AX = F \quad (2.6)$$

$$(I - A)X = F \quad (2.7)$$

Sehingga besarnya output dapat dihitung sebagai pengaruh induksi permintaan akhir, seperti pada persamaan berikut:

$$X = (I - A)^{-1} F \quad (2.8)$$

dimana:

X = matriks total output berukuran (n x 1)

I = matriks identitas berukuran (n x n)

F = matriks permintaan akhir berukuran (n x 1)

A = matriks koefisien input /teknis berukuran (n x n)

Besar kecilnya dampak dari kenaikan total output akibat kenaikan permintaan akhir tergantung dari besar kecilnya pengganda $(I-A)^{-1}$. Persamaan (2.8) inilah yang menjadi inti dari model input-output, sedangkan $(I-A)^{-1}$ disebut sebagai Matriks Kebalikan (*inverse*) Leontief yang berfungsi sebagai pengganda output (*output multiplier*).

2.5.2 Asumsi dan Keterbatasan Analisis Input-Output

Asumsi-asumsi yang terdapat dalam analisis input output adalah (BPS, 2008):

1. Homogenitas, yaitu asumsi bahwa tiap sektor hanya memproduksi satu jenis output dengan struktur input yang tunggal dan bahwa tidak ada substitusi otomatis antar output dari sektor yang berbeda.
2. Proporsionalitas, yaitu asumsi bahwa kenaikan penggunaan input oleh suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan output yang dihasilkan oleh sektor tersebut.
3. Additivitas, yaitu asumsi bahwa jumlah pengaruh total dari pelaksanaan produksi di berbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing sektor secara terpisah. Ini berarti bahwa di dalam sistem input-output semua pengaruh dari luar diabaikan.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, terdapat beberapa keterbatasan dalam tabel input-output. Keterbatasan ini merupakan implikasi dari fungsi produksi Leontief yang bersifat *constant return to scale* seperti dibahas pada subbab

sebelumnya. Keterbatasan itu antara lain adalah pada rasio input terhadap output yang diasumsikan konstan sepanjang periode analisis, sehingga perubahan susunan input atau perubahan teknologi dalam kegiatan produksi tidak dapat dideteksi menggunakan model input-output. Produksi tak dapat menyesuaikan perubahan-perubahan inputnya atau perubahan dalam proses produksinya. Hubungan yang tetap ini berarti menunjukkan bahwa apabila input suatu sektor digandakan maka outputnya juga akan ganda secara proporsional dengan penambahan input. Artinya peningkatan output di suatu sektor hanya diakibatkan oleh peningkatan inputnya dan bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yang digunakan seperti perubahan teknologi dan produktivitas. Dengan demikian juga berarti perubahan kuantitas dan harga input juga sebanding dengan perubahan kuantitas dan harga output.

Kelemahan lain dari analisis input-output dengan menggunakan tabel input-output biasa adalah analisis ini tidak mampu melihat dampak yang ditimbulkan oleh adanya pengaruh eksogen pada kelompok pendapatan dalam suatu perekonomian. Hal inilah yang mendasari pemilihan model Miyazawa sebagai alat analisis untuk melihat lebih jauh dampak dari perubahan salah satu komponen permintaan akhir terhadap distribusi pendapatan masyarakat.

2.6 Model Miyazawa

Sesuai dengan namanya, model ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ekonom Jepang bernama Kenichi Miyazawa (1976). Dalam analisisnya, Miyazawa mengungkapkan secara eksplisit faktor pendapatan dengan membagi pendapatan berdasarkan beberapa kelompok, yaitu kelompok pendapatan masyarakat desa, kota, dan yang tinggal di daerah perumahan (*estate*). Selanjutnya, berdasarkan pengelompokan pendapatan tersebut dapat dilihat apakah distribusi pendapatan dari ketiga kelompok tersebut terbagi dengan merata.

Model Miyazawa merupakan pengembangan lebih lanjut dari kerangka kerja input-output dimana perbedaannya terletak pada blok input primer dan konsumsi rumah tangga. Pada model ini, upah dan gaji serta sebagian surplus usaha yang diterima sebagai balas jasa faktor produksi tenaga kerja dibagi lagi

Universitas Indonesia

berdasarkan beberapa kelompok pendapatan, demikian juga dengan konsumsi rumah tangga yang dibagi berdasarkan beberapa kelompok pendapatan sesuai dengan kelompok pendapatan di atas dan dijadikan sebagai variabel endogen.

Kelebihan dari model Miyazawa ini dibandingkan dengan analisis input-output standar adalah dalam melihat distribusi antar kelompok pendapatan dan sekaligus membelah pendapatan agar dapat dilihat tingkat distribusinya dalam perekonomian suatu wilayah atau negara (Sonis, 2000). Hal inilah yang mendasari pemilihan model Miyazawa sebagai alat analisis untuk melihat lebih jauh dampak dari perubahan pada salah satu faktor dalam permintaan akhir terhadap distribusi pendapatan.

Dalam konstruksi tabel input-output model Miyazawa ini, sektor rumah tangga yang dibagi menjadi beberapa kelompok pengeluaran berdasarkan pendapatannya dimasukkan sebagai variabel endogen atau dianggap seperti produsen dan sebagai penyeimbangannya adalah pada input primer yaitu baris nilai tambah dalam hal ini upah & gaji dan sebagian surplus usaha juga dibagi ke dalam beberapa kelompok yang jumlah kelompoknya sama dengan jumlah kolom kelompok pengeluaran rumah tangga. Dengan pendekatan matriks, model Miyazawa dapat digambarkan dalam bentuk berikut:

$$M = \begin{bmatrix} A & C \\ V & 0 \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

dimana:

A = koefisien teknologi (nxn)

C = koefisien konsumsi rumah tangga (nx3)

V = koefisien nilai tambah (3xn)

Sebagaimana dalam analisis input-output model standar, dalam model Miyazawa juga diperhitungkan nilai dari matriks kebalikan Leontief yang mencerminkan efek langsung dan tidak langsung dari perubahan permintaan akhir terhadap sektor-sektor di dalam perekonomian (Sonis, 2000).

Bentuk matriks kebalikan Leontief dari persamaan (3.1) adalah sebagai

berikut:

$$B(M) = (I - M)^{-1} = \begin{bmatrix} (I - A) & -C \\ -V & I \end{bmatrix}^{-1} \quad (2.10)$$

Apabila terdapat perubahan dalam vektor permintaan akhir, maka akan ada pula perubahan pola pendapatan sektoral dan rumah tangga. Dan kondisi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (I - A) & -C \\ -V & I \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

Model Miyazawa memiliki kelemahan, yaitu hanya berbicara mengenai distribusi pendapatan dalam bentuk kelompok pendapatan tertentu dan tidak lebih mendalam melihat distribusi pendapatan secara faktorial dan institutional. Untuk dapat melihat distribusi pendapatan secara faktorial dan institutional biasanya digunakan analisis *Social Accounting Matrix* (SAM). Namun karena tidak tersedianya tabel SAM tingkat regional Sulawesi Tengah, maka dalam penulisan ini menggunakan analisis model Miyazawa.

2.7 Penelitian-Penelitian Terdahulu

Antara (1999) menggunakan model *Social Accounting Matrix* (SAM) untuk meneliti dampak pengeluaran pemerintah dan wisatawan terhadap perekonomian Bali. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa distribusi pendapatan faktorial (antar faktor produksi) menunjukkan bahwa kontribusi faktor produksi modal lebih besar daripada faktor tenaga kerja. Hal ini berarti bahwa proses produksi bersifat padat modal.

Dalam penelitian lain yang menggunakan model input output, Antara (2005) menemukan bahwa kontribusi usaha kecil sektor pariwisata terhadap pendapatan regional Bali adalah sebesar 16,3 persen. Usaha kecil pariwisata mampu menciptakan upah gaji, surplus usaha, dan pajak tidak langsung yang besar, yang berarti bahwa sektor ini mampu menjadi penggerak perekonomian Bali. Ia juga menyimpulkan bahwa sektor ini mampu berperan menciptakan

permintaan akhir atas barang yang langsung dikonsumsi yaitu sebesar 19,36 persen dari total permintaan akhir di Bali.

Ernita Maulida (2003) melakukan penelitian dengan menggunakan model input output Miyazawa mengenai dampak pengeluaran wisatawan terhadap distribusi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja di Bali. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapatnya kecenderungan distribusi dari pendapatan yang ditimbulkan permintaan akhir maupun ekspor lebih banyak diterima oleh kelompok pendapatan sedang. Sedangkan untuk kelompok pendapatan rendah dan tinggi, distribusi pendapatan terbagi hampir merata.

Dalam penelitian mengenai potensi pariwisata sebagai salah satu alternatif dalam upaya peningkatan perekonomian daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dilakukan oleh Windari (2006) dengan menggunakan model input output, diperlihatkan bahwa peran pariwisata terhadap output DIY sebesar 5,89 persen sedangkan terhadap upah dan gaji sebesar 6,04 persen di tahun 2004. Dalam hal output, sektor yang paling besar menerima dampak dari pariwisata adalah industri pengolahan, sedangkan dalam hal upah gaji adalah sektor jasa lain.

Dengan menggunakan metode *Computable General Equilibrium*, Narayan (2004) menyimpulkan bahwa peningkatan pengeluaran wisatawan sebesar 10 persen akan meningkatkan GDP sebesar 0,5 persen, meningkatkan konsumsi riil sebesar 0,72 persen dan kesejahteraan nasional riil sebesar 0,67 persen. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa ekspansi pariwisata akan meningkatkan nilai tukar, bersamaan dengan meningkatnya harga domestik dan tingkat upah gaji.

Dari berbagai penelitian sebelumnya, diketahui bahwa pariwisata dapat diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pariwisata juga dapat mengembangkan sektor-sektor usaha kecil yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan penduduk miskin sekaligus mengatasi masalah ketimpangan pendapatan.